

**INDIKATOR KERJA UTAMA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

No	ISU STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKTOR	FORMULASI INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
	Belum Terintegrasinya Database dan Layanan e-Governance	Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana penunjang perekonomian yang berkualitas	Persentase Jangkauan teknologi informasi dan komunikasi	Belum meratanya jangkauan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mewujudkan E-Government	SKPD/Desa yang dapat menjangkau aplikasi e-Government pada server Diskominfo dibagi jumlah keseluruhan	DISKOMINFO
	Belum Efisiensinya Infrstruktur Telekomunikasi	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan IT dengan baik	Belum semua SKPD mengimplementasikan IT dengan baik dalam rangka mewujudkan E-Government	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan IT dengan baik dibagi dengan jumlah perangkat daerah dikali 100	DISKOMINFO
	Berkembangnya teknologi informasi berdampak pada informasi yang negatif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan	Membangun Citra Positif Pemkab Kabupaten HSS	Rasio berita positif dan negatif di media massa tentang Kabupaten HSS	Menciptakan berita yang berimbang dalam era keterbukaan informasi	Jumlah berita positif dibanding dengan jumlah berita negatif di media massa	DISKOMINFO
		Meningkatnya Pengamanan dan Layanan InformMeningkatnya kualitas layanan dan pengelolaan statistik dan persandian	Dokumen statistik yang tersedia	Data statistik diperlukan untuk merencanakan pembangunan dan menuju Indonesia Satu Data	Jumlah dokumen statistik yang tersedia	DISKOMINFO
			%Pengamanan informasi daerah	Perlunya pengamanan informasi dalam tata kelola pemerintahan	Jumlah informasi daerah yang diamankan dibagi dengan jumlah informasi daerah dikali 100 persen	DISKOMINFO
	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen SAKIP	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Laporan Keuangan	Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg SAKIP maka sebagai pemerintahan berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan No. 53 tahun 2014 ttg Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Review AKIP	DISKOMINFO
				Jumlah temuan BPK RI / Inspektorat dibagi jumlah yang ditindaklanjuti x 100%	DISKOMINFO	

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Drs. Hendro Martono, MT  
1973039 199402 1 002



